



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMUNGUTAN PARKIR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA
PASAR MINAS KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**ANDRE BOY SANDI
NIM.11627104242**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak"*** yang ditulis oleh:

Nama : Andre Boy Sandi

NIM : 11627104242

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Jumadil Akhir 1442 H
22 Januari 2021 M

Pembimbing Skripsi

Firdaus, SH., MH.
NIP. 1966100211994031002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

© hak cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul, “PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMUNGUTAN PARKIR
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
KEHIBUSAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA PASAR MINAS
KABUPATEN MINAS KABUPATEN SIAK” yang ditulis oleh :

Nama : Andre Boy Sandi
NIM : 11627104242
Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui dan disahkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 03 februari 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Hajar, M.Ag

Roni Kurniawan, SH, MH

Dia Indraajaya, S.Ag., M.Ag

Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dianggap memenuhi sebagian atau seluruh kanya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Handwritten signatures of the review team members.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, mengatur mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Oleh karena itu untuk melakukan penertiban terhadap pemungutan parkir di Pasar Minas tersebut tentunya merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar pemungutan parkir tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dan hasil pemungutan tersebut harus dapat disetorkan kepada Dinas Pendapatan dalam rangka untuk meningkatkan PAD, namun kenyataan di lapangan pemungutan tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dan hasil pemungutannya tidak disetorkan kepada Dinas Pendapatan.

Dari kenyataan yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: “Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak”

Dari uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti dalam tulisan yakni bagaimana pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, serta bagaimana upaya pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan penertiban pemungutan parkir di Pasar Minas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penertiban pemungutan parkir di Pasar Minas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dilihat dari segi pemungutan bahwa petugas parkir yang memungut retribusi parkir tersebut harus menggunakan dokumen atau karcis resmi dari Dinas Perhubungan. Selanjutnya penetapan retribusi dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan, bahwa setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah ditetapkan sesuai dengan tarifnya. Kemudian ketentuan pembayaran retribusi parkir harus dilakukan penyeteroran langsung pada hari itu juga dan pada jam kerja. Dinas Perhubungan melakukan pemantauan terhadap hal ini agar pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dilihat dari penerapan sanksi administratif bagi yang tidak menggunakan karcis, yakni berupa teguran atau denda. Kemudian dari segi penagihan, bahwa petugas yang ditunjuk harus segera menyetorkan kepada kas daerah, apabila terlambat akan diberikan surat teguran. Kemudian pemeriksaan dapat dilakukan terhadap petugas pemungut yang lalai dalam menyetor hasil retribusi parkir. Kemudian juga dapat dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwajib atau pejabat yang ditunjuk terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh petugas pemungut. Sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan kepada petugas yang lalai atau tidak melakukan penyetoran kepada kas daerah, dengan sanksi pidana berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak dibayar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “ ***Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak***” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda M. Nur, dan Ibunda Mardailis yang selalu hidup di hati sanubari ini, kaka ku yang tersayang Melita Camindri, Trian Supriadi Alen, serta semua sanak family yang tidak bisa disebutkan satu per satu dengan tidak mengurangi rasa hormat.
2. Bapak Prof. Dr. H.Suyitno, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak DR. H. Hajar,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
5. Bapak Firdaus S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Firdaus, Sh., MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam penelitian ini.
7. Bapak Asril, S.H.i, M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Camat Minas, Lurah Desa Minas, Badan Permusyawaratan Desa, dan seluruh staff jajaran yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam mendapatkan informasi.
9. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
10. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
11. Kepala Suku Batin V Sakai, HPPMSR, PT Cevron, PT. Ara-Ara Abadi, Pemerintah Kabupaten Siak.
12. Sahabat perjuangan susah senang yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan yaitu angkatan 2016 khususnya kelas IH E.
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin....

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Januari 2021

ANDRE BOY SANDI
NIM.11627104242

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kabupaten Siak	14
B. Kecamatan Minas.....	17
C. Dinas Pendapatan Siak.....	18
D. Gambaran Tentang Pasar Minas	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Daerah.....	25
B. Pengertian Pajak.....	28
C. Pajak/Retribusi	30
D. Metode Pemungutan Retribusi/Pajak.....	32
E. Macam-macam Pajak/Retribusi Daerah.....	34
F. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Upaya Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak.....	46
---	----

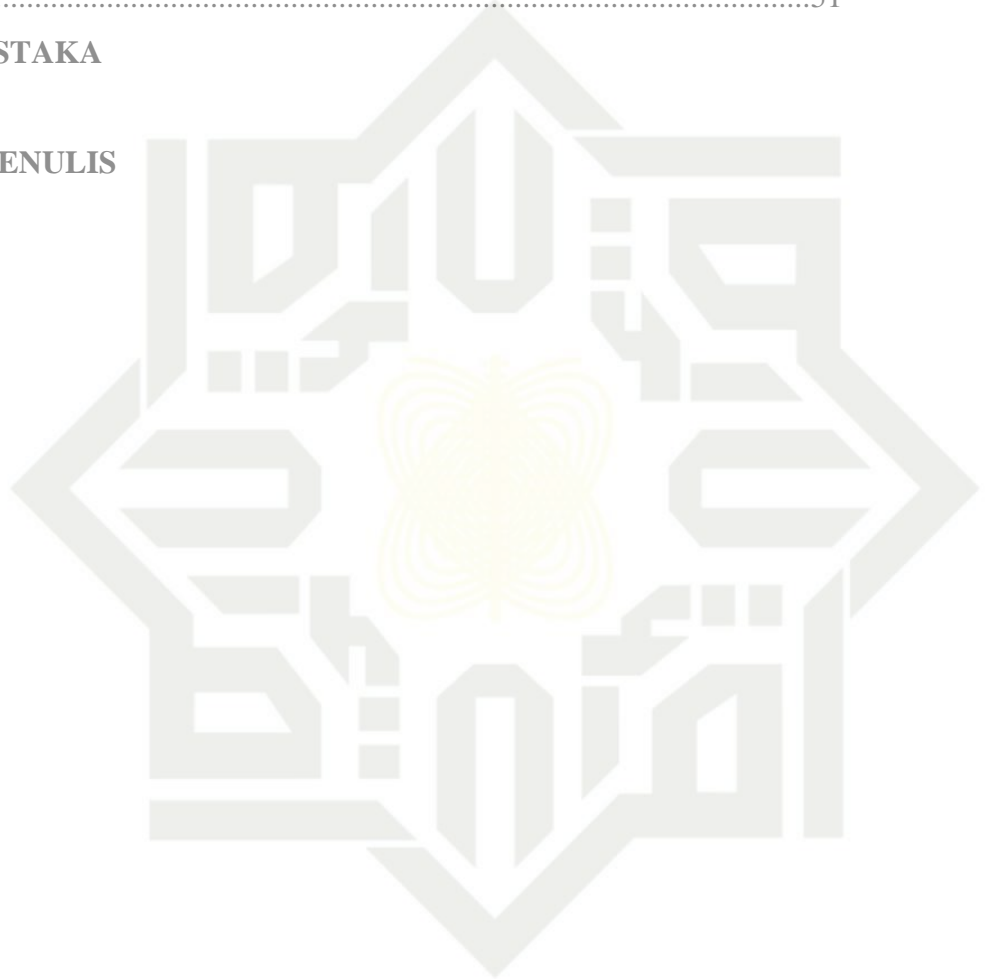
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	11
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kepada daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

¹Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyusun yang mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagai dana pembangunan yang dikenal dengan PAD.

Kabupaten Siak melalui Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni membantu kepala daerah dalam rangka menjabarkan program kerja kepala daerah di bidang pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan, bahwa pendapatan asli daerah berupa:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka untuk menambah pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk membuat regulasi atau payung hukum untuk membuat kebijakan tersebut. Sebagaimana halnya pemerintah Kabupaten Siak yang sudah berusaha untuk membuat regulasi mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaturan mengenai parkir di tepi jalan umum tersebut, maka setiap orang yang menggunakan tempat parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah setempat, wajib membayar retribusi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah tersebut.

Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa, Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Sedangkan subjek dari retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.³

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.⁴

Namun dalam prakteknya petugas parkir tidak pernah memberikan karcis atau tanda parkir kepada pengendara roda dua atau roda empat sebagaimana yang terjadi di Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dengan demikian maka pungutan uang parkir tersebut tidak disetorkan kepada kas daerah atau kepada petugas yang ditunjuk untuk itu.

³Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

⁴Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu perlu dilakukan penertiban terhadap pemungutan uang parkir di Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak oleh petugas yang diunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa, pemungutan parkir di Pasar Minas tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak menggunakan karcis dan tanda pengenal sebagaimana layaknya seorang tukang parkir. Tentunya pemungutan parkir ini tidak disetorkan kepada Dinas Pendapatan, karena tergolong parkir liar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, jelas mengatur mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Oleh karena itu untuk melakukan penertiban terhadap pemungutan parkir di Pasar Minas tersebut tentunya merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar pemungutan parkir tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dan hasil pemungutan tersebut harus dapat disetorkan kepada Dinas Pendapatan dalam rangka untuk meningkatkan PAD, dan jangan sampai pemungutan tersebut hanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dan hasil pemungutannya tidak disetorkan kepada Dinas Pendapatan, sehingga tujuan dari Perda tersebut tidak akan tercapai, yaitu untuk meningkatkan PAD Kabupaten Siak.

Dari kenyataan yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: “Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak”.

Batasan Masalah

Untuk memberikan penjelasan terhadap pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis membatasi kepada hal-hal yang berhubungan dengan penertiban pemungutan uang parkir di Pasar Minas, yakni pelaksanaan penertiban terhadap pemungutan tersebut, serta upaya yang dilakukan dalam penertiban pemungutan uang parkir di Pasar Minas Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak?
2. Bagaimana upaya pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 di Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 di Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan tujuan dari penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka mendalami ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Di samping itu juga dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam hal yang sama.
- b. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi perangkat pemerintah daerah yang berhubungan dengan penegakan Perda, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, serta masyarakat yang terlibat juga harus memahami akan kepentingan penerapan Perda tersebut.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁵ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan penertiban pemungutan parkir di Pasar Minas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,⁶ artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penertiban

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

⁶ *Ibid*, h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengungutan parkir di Pasar Minas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian di Pasar Minas. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa pengungutan uang parkir di Pasar Minas dilakukan oleh oknum yang tidak resmi, tidak menggunakan karcis dan tanda pengenal parkir, sehingga uang parkir tersebut tidak disetorkan kepada Dinas Pendapatan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas pengungut parkir dan petugas dari Dinas Pendapatan Kabupaten Siak. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penertiban pengungutan parkir di Pasar Minas Kabupaten Siak.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,⁷ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan penertiban pengungutan parkir di Pasar Minas Kabupaten Siak.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Grafindo Persada, 2008), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwujud laporan dan sebagainya,⁸ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

- c. Data tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.⁹ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak 1 orang, Kepala Satpol PP Siak 1 orang, dan oknum pemungut parkir di Pasar Minas 1 orang. Oleh karena populasi jumlahnya tidak terlalu besar, maka penulis mengambil seluruh populasi sebagai sampel dalam penelitian dengan metode total sampling.

⁸*Ibid*, h.30

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

¹⁰*Ibid*, h.119

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
Kepala Bagian Pemungut Dishub Siak	1	1	100%	Total Sampling
Kepala Satpol PP Siak	1	1	100%	Total Sampling
Oknum Pemungut Parkir di Pasar Minas	1	1	100%	Total Sampling
JUMLAH	3	3	100%	Total Sampling

Sumber: Data lapangan, 2020

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹¹

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Kepala Bagian Pemungut pada Dispenda Siak, Kepala Satpol PP Siak, dan oknum pemungut parkir di Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

¹¹Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

7. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dalam tulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis dalam melakukan pembahasan juga menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan teori atau pendapat para ahli agar mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yakni menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari gambaran tentang Kabupaten Siak, Kecamatan Minas, Dinas Pendapatan Siak, dan gambaran tentang Pasar Minas.

¹²Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

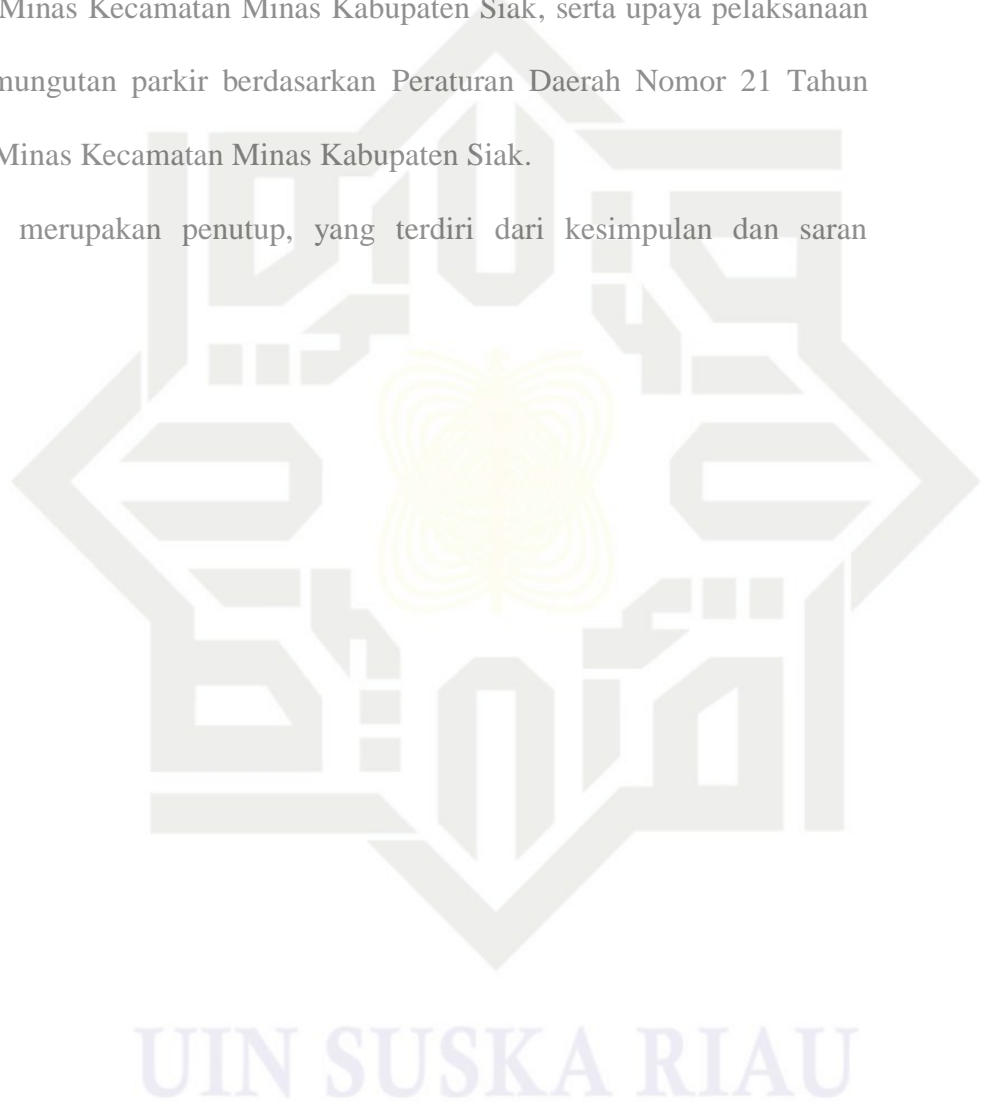
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III menggambarkan tentang Pemerintah Daerah, Pengertian Retribusi, Metode Pemungutan Retribusi, dan Macam-macam Retribusi Daerah.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi pelaksanaan pertertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 di Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, serta upaya pelaksanaan pertertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 di Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.





BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau Indonesia, dengan pusat pemerintahan berada di Siak Sri Indrapura, dengan luas wilayah Kabupaten Siak adalah 8.580,92 Km², dengan jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebanyak 477.670 Jiwa. Jumlah kecamatan sebanyak 14 Kecamatan, jumlah desa sebanyak 122 desa, dan jumlah kelurahan sebanyak 9 kelurahan, yang berada dalam wilayah Kabupaten Siak.

Visi Kabupaten Siak sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka visi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah: “Pusat Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera pada Tahun 2025”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Misi mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu di Riau, adalah menjadikan adat istiadat melayu sebagai nilai dasar dan alat pemersatu warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi norma-norma hukum.
2. Misi mewujudkan Kabupaten Siak dengan sektor agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju adalah mendorong pembangunan sektor-sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut untuk menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan.

Misi mewujudkan Kabupaten Siak yang agamis dan sejahtera adalah mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas.

Kabupaten Siak mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102" 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah arganosol dan gley humus dalam bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25 derajat sampai dengan 32 derajat celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah Danau ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan Tasik Rawa.¹³

Gambaran Kabupaten Siak secara geografis tersebut merupakan gambaran yang dibuat melalui penelitian dan kajian lapangan, sebagaimana kondisi yang sebenarnya ada dan terjadi menurut kondisi alam di wilayah Kabupaten Siak.

¹³Kabupaten Sika Dalam Angka, Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B Kecamatan Minas

Minas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kota Minas merupakan salah satu daerah yang pertumbuhannya cukup pesat dibandingkan dengan daerah yang lainnya yang ada di Kabupaten Siak. Minas mempunyai ladang minyak yang kaya, bersama Duri dan Dumai. Prestasi ladang minyak Minas memberi sumbangan besar dari Tahun 1970, rata-rata dengan produksi pada kisaran 200.000 – 400.000 barrel perhari bagi produksi minyak mentah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Siak. Kecamatan Minas ini sudah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Ketika itu Kecamatan Minas merupakan salah satu kecamatan di wilayah pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Siak.

Kecamatan ini terletak 93 Km barat daya ibukota kabupaten, yakni Siak Sri Indrapura dengan waktu tempuh lebih kurang 2 (dua) jam. Tanah Minas kaya akan minyak bumi dan tersebar luas hamparan perkebunan sawit. Di samping itu terdapat sentra kerajinan keramik di daerah Belutu, lebih kurang 50 Km dari Minas ke arah Dumai. Prospek permintaan hasil kerajinan ini di lingkup lokal maupun luar kota sangat bagus, bahkan dari luar negeri juga ada. Namun begitu kerajinan ini masih dikelola dalam industri rumahan, perlu adanya bapak angkat untuk bantuan permodalan dan manajemen pemasarannya.

Jumlah penduduk Kecamatan Minas terdiri dari laki-laki berjumlah 11.381 jiwa dan perempuan sebanyak 10.003 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 4.155 Kepala Keluarga.¹⁴ Jenis pekerjaan penduduk Kecamatan Minas terdiri dari bermacam-macam, ada yang pertanian/ perkebunan, buruh tani, pekerja harian, sebagai pegawai negeri sipil dan sebagainya.

Dinas Pendapatan Siak

Dinas Pendapatan Kabupaten Siak merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, yang membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok untuk menjabarkan program kerja dalam rangka meningkatkan pendapat daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Siak diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan keikutsertaan dinas-dinas teknis dalam mengaplikasikan program-program yang menjadi prioritas daerah, maka Pemerintah Kabupaten Siak memberikan amanat kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.

Sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak berperan dalam:

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Membina yang merupakan segala usaha dan kegiatan pelatihan serta bimbingan ke arah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan kebijakan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, pengawasan/pemantauan, pengembangan, dan pengkajian serta pengendalian potensi penerimaan daerah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah, melalui penetapan surat pajak/retribusi daerah yang terhutang serta besarnya angsuran wajib pajak.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi objek dan subjek pajak/retribusi daerah, perhitungan realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengarsipan surat-surat perpajakan daerah.
- f. Merumuskan dan melaksanakan, pengembangan, pengawasan dan pemeriksaan lokasi penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
- g. Merumuskan dan melaksanakan penagihan pajak/retribusi daerah, pembinaan pembukuan dan verifikasi, serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap penetapan/retribusi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Merumuskan dan melaksanakan peñatausahaan atas objek dan subjek pajak, penerimaan retribusi, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan pendapatan lain-lain, dan surat-surat berharga serta legalisasinya.¹⁵

Sebagai pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan daerah, maka

Dinas Pendapatan Siak berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pelayanan umum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan, pendistribusian dan penagihan tunggakan pendapatan daerah.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan pajak/retribusi daerah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan pembayaran retribusi.
- e. Merumuskan dan melaksanakan peyampaian dan penerimaan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak.

Selanjutnya sebagai pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas, maka Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.

¹⁵Ekspos Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membina pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan, serta administrasi kepegawaian.
- d. Merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol, kearsipan, keuangan dan kepegawaian.¹⁶

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Siak didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Sub Dinas Program, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan serta pengendalian potensi pendapatan daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak/retribusi daerah, serta pendataan objek pajak/retribusi daerah, melaksanakan perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak.

¹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Dinas Penagihan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penagihan pajak/retribusi daerah yang telah lewat waktu jatuh tempo, melakukan pembukuan dan verifikasi, melayani keberatan dan permohonan banding serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap pendapatan/retribusi daerah.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan badan usaha milik daerah, melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan pengkajian sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

D. Gambaran Tentang Pasar Minas

Pasar Minas terbentuk sebelum pemekaran Kabupaten Siak, yang dulunya masih termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis. Perkembangan wilayah Kecamatan Minas meningkat cukup signifikan, yang berada mulai dari pinggir jalan sampai ke los-los pasar yang ada di dalam. Pasar Minas berada di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Duri dengan luas pasar lebih kurang 3 Ha.

Pedagang di Pasar Minas berjumlah lebih kurang 1.612 orang yang mana jenis dagangan pada umumnya ialah barang harian. Di Pasar Minas jumlah kios

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah terdiri dari 68 petak, Ruko Swadaya sebanyak 53 petak, dan ditambah 13 unit Los Pemerintah Daerah.

Pasar Minas memiliki sebuah unit pelaksana teknis daerah (UPTD), yang dimana UPTD ini khusus mempunyai fungsi mengelola Pasar Minas bersama pengurus pasar. UPTD berfungsi khusus menertibkan, dan mengelola Pasar Minas ke arah yang lebih baik, agar Pasar Tradisional memiliki kenyamanan baik bagi pembeli, terkhusus bagi pedagang.

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung terhadap kelancaran dan kenyamanan pasar, dimana dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan efisien. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada UPTD Pasar Minas, sebagai berikut.

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan UPTD	1	Baik
2	Kios Pemda	68	Baik
3	Los Pemda	13	Baik
4	Ruko Swadaya	53	Baik
5	Bangunan WC	3	Baik

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa, sarana dan prasarana yang ada di UPTD Pasar Minas, dari tabel jumlah Kios Pemda merupakan jumlah yang mendominasi di dalam pasar tersebut, dengan alasan pasar tersebut merupakan pasar yang memberi kenyamanan baik bagi pembeli, maupun bagi pedagang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang masih dirasa kurang adalah bangunan MCK/WC, yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, dan ke depan perlu ada penambahan WC yang layak, dan dapat memberikan pelayanan yang nyaman bagi pengunjung pasar.

Pemerintah Kabupaten Siak secara bertahap memang mengalokasikan dana untuk pembangunan Pasar Minas, karena posisi dan letak dari Pasar Minas tersebut adalah di pinggi jalan lintas Pekanbaru-Duri, yang setiap hari ramai dilewati oleh berbagai kendaraan, dan juga diharapkan banyak yang akan berbelanja di Pasar Minas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Siak senantiasa mengembangkan pasar tersebut sebagai pasar persinggahan karena berada di pinggir jalan lintas. Sehingga perkembangan dari Pasar Minas diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan masyarakat Siak pada umumnya.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan otonomi daerah dinyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendaknya.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerntahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).¹⁷ Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:

¹⁷Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.9

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk, biasanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali bersama.
- b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraannya kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.¹⁸

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut I. Widarta¹⁹ pengertian pemerintah menurut system desentralisasi telah mengalami lompatan yang lebih maju. Hal ini didasarkan kepada dua aspek penting yang terkandung dalam pengertian Pemerintah Daerah, yakni: 1) Pemerintah (an) Daerah memiliki eksistensi sejalan dengan keberadaan daerah. Pemerintah (an) Daerah tidak semata-mata ada karena ada pemerintah

¹⁸Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.30

¹⁹I.Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, (Jakarta: Lapera, 2001), h.31

pusat, melainkan sebagai organisasi kekuasaan daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 2) Pemerintah terdiri dari dua jenis kekuasaan yakni eksekutif dan legislatif, dimana keduanya dipisahkan.

Pemerintah (an) Daerah juga sering disebut dengan istilah lain yaitu Pemerintahan Lokal. Menurut R.Joeniarto²⁰ dikatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan lokal ada dua macam, yakni:

- a. Pemerintah lokal administratif (*local state government*), yaitu merupakan bagian atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya. Hubungan antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atasan dengan bawahan. Untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, segala sesuatunya dibiayai dari keuangan pemerintah pusat dengan otorisasinya.
- b. Pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (*local autonomous government*). Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah lokal yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri tentang tindakan apa yang akan dan harus diambil serta pelaksanaannya agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya guna kepentingan rumah tangganya. Hubungan antara pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan pemerintah

²⁰R.Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat atau pemerintah atasannya merupakan hubungan pengawasan, tidak dalam hubungan atasan dan bawahan atau hubungan menjalankan perintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah dibagi tiga macam, yaitu Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (vide Pasal 3 ayat 1). Namun porsi penekanan otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Propinsi hanya bersifat koordinasi, dimana kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota maka kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Propinsi.

B. Pengertian Pajak

Sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah dan pemerintah daerah memerlukan dana atau sumber pendapatan guna dapat mewujudkan tujuan tersebut, salah satu sumber dana yang dimaksud adalah hasil penerimaan dari pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²¹

Dari definisi pajak di atas dapat dipahami, bahwa wajib pajak memang tidak mendapat prestasi langsung dari hasil pajak yang dibayarnya, tetapi prestasi dari pemerintah tersebut tetap dirasakan secara tidak langsung oleh wajib pajak, misalnya dalam menggunakan jalan, rumah sakit, sekolah, serta fasilitas lainnya, yang berguna untuk masyarakat umum.

²¹Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1997), h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu selaku warga negara yang baik sudah sepatutnya harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi untuk kelancaran pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Atau dengan kata lain pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian atau definisi pajak tersebut adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.²²

²²R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 2003), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Pajak/Retribusi

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.²³

1. Pajak dan Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Jasa Umum adalah pajak atau retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Pajak dan Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial, yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

²³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

3. Pajak dan Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Izin peruntukkan penggunaan tanah.
- b. Izin mendirikan bangunan.
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- d. Izin gangguan.
- e. Izin trayek.

Kesemua jenis pajak dan retribusi tersebut adalah merupakan pendapatan asli daerah, yang dapat menopang pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Oleh karena itu pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan bentuk dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah, dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Pemungutan Retribusi/Pajak

Retribusi/Pajak merupakan pungutan dengan sifat khusus, yaitu tanpa adanya jasa timbal secara langsung. Hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak. Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak.²⁴

Adapun ciri khusus dari pajak adalah bahwa terhadap pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal secara langsung. Artinya jasa timbal dari pemerintah ada tetapi tidak secara langsung ditujukan kepada wajib pajak yang bersangkutan, dan jasa timbalnya biasanya ditujukan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan umum. Misalnya diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan, bangunan atau fasilitas umum, maupun sarana lain yang semuanya ditujukan untuk kepentingan umum.

Demikian juga halnya dengan pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang ada di daerah dalam rangka untuk menunjang pembangunan di daerah.

Di samping retribusi/pajak daerah, juga terdapat retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah sering diandengkan karena merupakan pemasukan daerah dari berbagai aspek dan sektor pungutan.

²⁴Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak dan retribusi daerah adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Sejalan dengan pengertian Pajak daerah, maka penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang diterapkan, berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakan atas usul dan kepentingan Rumah Tangga Swasta dan prestasi tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengawas publik.

Pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dari pengertian di atas, maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dari besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan. Pajak dan Retribusi juga suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya pembayaran itu.²⁵

Dari kedua definisi di atas, tampak bahwa pajak dan retribusi sebenarnya merupakan imbalan atas jasa yang diterima dari negara atau daerah. Lebih jelasnya Manulang mendefinisikan Retribusi Daerah, adalah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah,

²⁵Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1985), h.44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari definisi di atas jelas bahwa tujuan dari pungutan pajak dan retribusi daerah bukannya mencari keuntungan, karena dari hasil pungutan tersebut yangutamakan adalah pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, serta untuk pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat. Oleh karena itu pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat.

E. Macam-macam Pajak/Retribusi Daerah

Pajak/Retribusi daerah sebenarnya merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan.

Sehubungan dengan hal itu, maka yang disebutkan dengan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah tersebut jenisnya sama, baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi mengatur dari pajak/retribusi tersebut di atas adalah dalam skala nasional, dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat secara umum. Namun dalam skala daerah, maka pajak daerah Propinsi dan daerah Kabupaten / Kota tersebut dapat berupa:

- a. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak hotel dan restoran.
- e. Pajak hiburan.
- f. Pajak reklame.
- g. Pajak penerangan jalan.
- h. Pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C.
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.²⁶

Jenis-jenis pajak/retribusi daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak tersebut di samping fungsi finansialnya, juga berfungsi mengatur, artinya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat daerah, di antaranya adalah dengan cara mengatur penggunaan pajak-pajak daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Adapun penggunaan pajak daerah tersebut secara tidak langsung juga dibelikan lagi kepada masyarakat, dalam wujud pembangunan, baik yang

²⁶ Ibid, h.35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa fasilitas umum maupun dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk bantuan sosial kemasyarakatan dan sebagainya.

Fungsi mengatur pajak daerah juga diwujudkan dalam bentuk memberi perhatian kepada masyarakat miskin, anak telantar, anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Juga dapat memberi perhatian terhadap pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya.

F. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Pinggir Jalan Umum berisi tentang:

Bab I Ketentuan Umum, berisi mengenai pengertian-pengertian, yang tercantum dalam Pasal 1. Pengertian disini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan isi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.

Bab II Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, yang dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Pada bab ini dijelaskan mengenai nama Peraturan Daerah, objek yang dimaksud, dan subjek yang dikenai retribusi.

Bab III Golongan Retribusi, yang dijelaskan dalam Pasal 5.

Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, yang dijelaskan dalam Pasal 6. Pada bab ini diuraikan mengenai tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan waktu penggunaan parkir di tepi jalan umum.

Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, dijelaskan dalam Pasal 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab VI Struktur dan Besarnya Retribusi, dijelaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Bab ini memberi pengenaan jasa parkir di tepi jalan umum.
- Bab VII Wilayah Pemungutan, dijelaskan dalam Pasal 10. Menjelaskan bahwa wilayah pemungutan adalah Kabupaten Siak.
- Bab VIII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, dijelaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12. Bab ini menjelaskan mengenai masa retribusi.
- Bab IX Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Retribusi, dijelaskan dalam Pasal 13. Bab ini menjelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi.
- Bab X Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, dijelaskan dalam Pasal 14.
- Bab XI Sanksi Administrasi, dijelaskan dalam Pasal 15.
- Bab XII Penagihan, dijelaskan dalam Pasal 16.
- Bab XIII Keberatan, dijelaskan dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
- Bab XIV Pengembalian Kelebihan Pembayaran, dijelaskan dalam Pasal 19.
- Bab XV Kadaluwarsa Penagihan, dijelaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Bab ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kadaluwarsa.
- Bab XVI Pemeriksaan, dijelaskan dalam Pasal 22.
- Bab XVII Penyidikan, dijelaskan dalam Pasal 23
- Bab XVIII Ketentuan Pidana, dijelaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- Bab XIX Ketentuan Peralihan, dijelaskan dalam Pasal 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab XX Ketentuan Penutup, dijelaskan dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Gambaran di atas merupakan sistematika dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dilihat dari segi pemungutan bahwa petugas parkir yang memungut retribusi parkir tersebut harus menggunakan dokumen atau karcis resmi dari Dinas Perhubungan. Selanjutnya penetapan retribusi dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan, bahwa setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah ditetapkan sesuai dengan tarifnya. Kemudian ketentuan pembayaran retribusi parkir harus dilakukan penyeteroran langsung pada hari itu juga dan pada jam kerja. Dinas Perhubungan melakukan pemantauan terhadap hal ini agar pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Upaya pelaksanaan penertiban pemungutan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dilihat dari penerapan sanksi administratif bagi yang tidak menggunakan karcis, yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa teguran atau denda. Kemudian dari segi penagihan, bahwa petugas yang ditunjuk harus segera menyetorkan kepada kas daerah, apabila terlambat akan diberikan surat teguran. Kemudian pemeriksaan dapat dilakukan terhadap petugas pemungut yang lalai dalam menyetor hasil retribusi parkir. Kemudian juga dapat dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwajib atau pejabat yang ditunjuk terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh petugas pemungut. Sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan kepada petugas yang lalai atau tidak melakukan penyetoran kepada kas daerah, dengan sanksi pidana berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak dibayar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui dinas terkait, harus benar-benar dapat melakukan pengawasan dan penertiban pemungutan retribusi parkir di pasar atau di pinggir jalan yang menyediakan tempat parkir, agar pemungutan retribusi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target yang akan dicapai dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Bagi pemungut retribusi parkir yang ditunjuk harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dan melakukan penyetoran terhadap hasil retribusi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu petugas

parkir juga harus melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh dedikasi agar pemungutan tersebut tidak menimbulkan kecurigaan bagi pihak lain. Oleh karena itu petugas harus menggunakan tanda pengenal dan juga menggunakan karcis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adya Barata dan Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kashna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Nugroho D, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2008
- Sunmyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004
- Suhda Guruh Langkah Samudera, *Menimbang Otonomi dan Federal*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Uson Gustiawan, *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2007



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMUNGUTAN PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA PASAR MINAS KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK”** yang ditulis oleh :

Nama : Andre Boy Sandi
NIM : 11627104242
Program Studi : Ilmu Hukum

Salah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 03 februari 2021
Waktu : Jam, 13.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hajar, M.Ag

Sekretaris
Rini Kurniawan, SH, MH

Penguji I
Omawati Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Mhd. Kristulani, SH., MH

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Undang F.I/PP.00.9/1009/2021

Bidang

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: andre boy sandi
NIM	: 11627104242
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Pasar minas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMUNGUTAN PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM PADA PASAR MINAS KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAG

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Ditilik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Kepada Yth :

DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIAK

di -

Tempat

71/Kesbangpol/10

Rekomendasi Riset

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON-RISET/37739, 18 Januari 2021 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **ANDRE BOY SANDI**
NIM : 11627104242
Program Studi : HUKUM HUKUM
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMUNGUTAN PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA PASAR MINAS KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 21 Januari 2021

**a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa

AWALUDDIN, SE

NIP. 19771213 201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
- Camat Minas;
- UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Minas;

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: ANDRE BOY SANDI

: 11627104242

: ILMU HUKUM

: *Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak*

: Firdaus, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Andre Boy Sandi**, anak ketiga dari tiga bersaudara yang lahir pada tanggal 15 April 1996 dari pasangan ayahanda M. Nur dan ibunda Mardailis. Dan memiliki dua saudara bersaudara kandung yaitu Melita Camindri dan Trian Supriadi Alen.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2003 SDN 006 Rantau Bertuah, Kec Minas, Provinsi Riau. lulus tahun 2009, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan SMP N 1 Minas, dan lulus tahun 2012, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SMA 1 Minas kemudian lulus pada tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2016 di fakultas Syariah dan Hukum Sarjana Hukum (SH), selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2021 penulis mengikuti ujian Sidang Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Sangat Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.